



EKONOMI

Viral! Owner SPBU Bali Mengadu Sambil Menangis ke Koster, Gubernur Cuma Melengos

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20:30 WIB



BANDA ACEH – Owner SPBU di Bali menangis meminta bantuan kepada Wayan Koster untuk mengatasi antrean BBM. Namun, gestur Gubernur Bali itu menuai sorotan netizen.

Sikap Gubernur Bali Wayan Koster kembali menjadi sorotan setelah video dirinya saat menerima keluhan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum

(SPBU) di kawasan Renon, Denpasar, viral di media sosial.

Di tengah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang mengular dan pegawai yang kelelahan, pemilik SPBU itu meminta bantuan personel tambahan sambil mengungkapkan kekhawatirannya.

Namun, gestur Koster yang beberapa kali terlihat memalingkan wajah justru memancing kritik warganet.



Peristiwa tersebut terjadi saat Koster meninjau kondisi pelayanan BBM di Bali pada Jumat (16/10/2026).

Pemilik SPBU meminta bantuan armada TNI-Polri untuk membantu mengurai antrean sekaligus meringankan beban pekerja yang harus melayani lonjakan pembeli.

Dengan nada penuh kekhawatiran, perempuan yang disebut sebagai pemilik SPBU itu menyampaikan

kan bahwa jumlah pegawainya terbatas.

Ia mengaku kasihan melihat para pekerja yang harus menghadapi situasi tersebut.

“Mohon bantuannya, kirim armadanya, kasihan pegawai saya, cuman 30 orang, sudah tua-tua semua, kasihan,” ujarnya dalam video yang beredar.

[Selengkapnya di halaman 13 »](#)

NASIONAL

Denny Indrayana Jawab Jokowi: Cawe-Cawe Pilpres 2024 Justru Operasi Politik



BANDA ACEH - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung

dugaan operasi Politik untuk menurunkan reputasi dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat isu ijazah.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

NASIONAL

Bentrokan Pemuda di Luwu Timur Memanas, Massa Lepaskan Tembakan Senjata Rakitan



BANDA ACEH - Bentrokan dua kelompok pemuda kembali pecah di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (16/10/2026) malam.

Konflik yang dipicu kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua

pelajar itu melibatkan aksi saling lempar batu hingga letusan senjata api rakitan atau papporo.

[Selengkapnya di halaman 4 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	10
Aneka Berita	13

NASIONAL

Viral Bocah Menangis Sendirian di Tenda Gunung Prau, Orang Tua Minta Maaf



BANDA ACEH - Video seorang bocah menangis sendirian di dalam tenda saat ditinggal orang tuanya melakukan pendakian menuju puncak atau summit di Gunung Prau, Jawa Tengah, viral di media sosial.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (15/10/2026) itu menuai sorotan warganet.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

MAKI Bongkar Rute Nusron Wahid ke Malaysia: Naik Kapal Feri



BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan rute perjalanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Malaysia.

Rute itu diungkap Boyamin usai Nusron kembali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada Kamis (15/10/2026).

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

TEKNOLOGI

How AI Photo Editing Is Changing Digital Creativity



BANDA ACEH - Digital creativity has become more accessible as photo-editing tools continue to evolve. What once required advanced software skills and hours of manual adjustments can now be achieved through simpler editing interfaces and AI-assisted features.

[Selengkapnya di halaman 13 »](#)

INTERNASIONAL

Anies Baswedan Terima Freedom of the City of London: Merdeka!



BANDA ACEH – Anies Baswedan menerima penghargaan sipil Freedom of the City of London dalam upacara di Guildhall, London, Jumat (16/10/2026). Ia pun menerima penghargaan tersebut dengan ucapan merdeka.

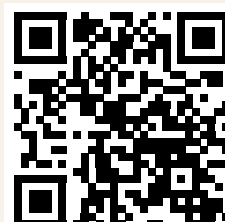
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu kemudian disambut sebagai “Citizen of London” pada akhir upacara.

[Selengkapnya di halaman 14 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

15 BERITA

NASIONAL

Viral Bocah Menangis Sendirian di Tenda Gunung Prau, Orang Tua Minta Maaf

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.12 WIB



BANDA ACEH - Video seorang bocah menangis sendirian di dalam tenda saat ditinggal orang tuanya melakukan pendakian menuju puncak atau summit di Gunung Prau, Jawa Tengah, viral di media sosial.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (15/10/2026) itu menuai sorotan warganet.

Dalam video yang beredar, bocah tersebut terlihat menangis di dalam tenda. Tangisannya terdengar oleh pendaki lain yang berada di sekitar lokasi hingga akhirnya menghampiri dan membantu anak tersebut.

Pendaki yang menolongnya mengaku heran melihat seorang anak kecil ditinggalkan di tenda ketika orang tuanya melakukan pendakian menuju puncak.

Rekaman itu kemudian diunggah ke TikTok dan menyebar luas. Banyak warganet mempertanyakan keputusan orang tua meninggalkan anaknya di tenda saat melakukan summit.

Setelah video tersebut menjadi perbincangan, pengelola Gunung Prau melalui akun Instagram

@prau_mountain memberikan informasi terbaru terkait kejadian tersebut.

Orang tua bocah itu diketahui mendatangi basecamp pada Sabtu (17/10/2026) untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan klarifikasi.

Dalam video klarifikasi yang dibagikan, sang ayah mengakui kelalaiannya dalam menjaga anak.

Dia juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun prihatin atas peristiwa tersebut.

"Saya selaku orang tua di video tersebut ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaiannya dalam menjaga anak saya," ujar sang ayah.

Dia mengaku kejadian tersebut menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya.

"Ini jadi pembelajaran buat saya untuk menjaga anak-anak saya dengan lebih baik lagi," katanya.

Sang ayah juga menyampaikan terima kasih kepada pendaki yang telah membantu anaknya ketika

menangis sendirian di dalam tenda.

Dia menyadari kejadian tersebut menjadi teguran bagi dirinya sebagai orang tua.

"Dan saya ucapkan terima kasih kepada kakaknya yang telah menjaga anak saya. Dengan kejadian ini menjadi teguran saya selaku orang tua," ujar dia.

Di akhir klarifikasinya, sang ayah kembali menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menjadi perhatian publik tersebut.

Kronologi Bocah Ditinggal di Tenda Gunung Prau

Melalui unggahan di Instagram @prau_mountain, pihak basecamp turut menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan keterangan orang tua bocah tersebut.

Sebelum ditinggalkan untuk melakukan summit, anak itu sedang tidur. Orang tuanya kemudian menitipkan sang anak kepada seorang teman yang mendirikan tenda di sebelahnya.

Namun, ketika bocah tersebut terbangun dan mulai menangis, teman yang dititipi disebut sedang

tertidur. Akibatnya, tangisan anak itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya terdengar oleh pendaki lain yang kemudian datang memberikan pertolongan.

Pihak basecamp juga mengungkapkan bahwa orang tua bocah tersebut meminta video yang telanjur viral segera dihapus atau diturunkan dari media sosial (take down).

Bahkan, berdasarkan keterangan dalam unggahan tersebut, orang tua bocah itu menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila video anaknya tidak segera diturunkan.

Pengelola Gunung Prau Ingat-kan Pendaki Jaga Keselamatan

Menanggapi kejadian tersebut, pengelola Gunung Prau mengingatkan bahwa ranger dan petugas tidak dapat mengawasi setiap pendaki satu per satu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

MAKI Bongkar Rute Nusron Wahid ke Malaysia: Naik Kapal Feri

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.06 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan rute perjalanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Malaysia.

Rute itu diungkap Boyamin usai Nusron kembali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada Kamis (15/10/2026).

Menurut Boyamin, Nusron diduga terbang dari Jakarta ke Batam sejak Rabu (14/10/2026), kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri ke Singapura sebelum menyeberang ke Johor Bahru, Malaysia.

"Diduga lewat Batam dan Singapura. Jadi penerbangan dari Jakarta ke Batam, nyebrang pakai kapal feri ke Singapura, dari Singapura kemudian nyebrang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru," kata Boyamin dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Boyamin menyebut Nusron diduga berada di Johor Bahru pada Kamis. Selama berada di sana, Nusron disebut berkeliling menggunakan kendaraan dinas Konsulat Jenderal.

"Nah di Johor Bahru ya hari Kamis itu, ya putar-putar pakai kendaraan dinas, Konsulat Jenderal maksudnya," sambung Boyamin.

Dia melanjutkan, Nusron diduga kembali ke Singapura pada Jumat (16/10/2026).

Namun, Boyamin mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai apakah Nusron sudah kembali ke Indonesia.

Boyamin menilai KPK dapat mempertimbangkan upaya membawa paksa Nusron karena dia disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

"Seorang saksi bisa dijemput itu apabila dua kali mangkir kalau dengan alasan. Kalau tanpa alasan, ya sekali aja sudah langsung bisa dijemput," ucap Boyamin.

Atas dasar itu, Boyamin meminta KPK menyiapkan langkah untuk membawa Nusron ke pemeriksaan setibanya di Tanah Air.

Dia bahkan menyarankan petugas menunggu kedatangan Nusron di bandara.

"Saya meminta KPK untuk melakukan surat perintah membawa nanti, untuk menyanggong di bandara misalnya. Nah itu hari Senin mestinya gitu, nah kita tunggu keberanian KPK," tutur Boyamin.

Informasi keberadaan Nusron di Malaysia sebelumnya terungkap berdasarkan keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Dia mengatakan Nusron belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN karena sedang perjalanan dinas ke Malaysia.

"Kalau nggak salah ke Malaysia," ujar Achmad kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Achmad menjelaskan, Nusron telah mengirimkan surat untuk meminta penundaan pemeriksaan.

Dalam surat tersebut, Nusron menyampaikan adanya agenda perjalanan dinas ke luar negeri yang berbenturan dengan jadwal pemanggilan penyidik.

"Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbenturan, kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan Perdin ke luar negeri," tuturnya.

Atas permintaan tersebut, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

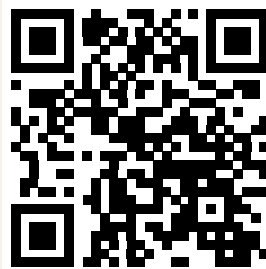
Namun, KPK belum menyampaikan tanggal pasti pemeriksaan berikutnya.

"Nah terhadap Saudara NW, betul bahwa tanggal 14 kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan untuk melakukan penundaan," katanya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

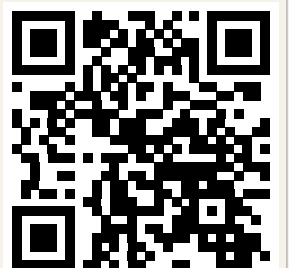
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Denny Indrayana Jawab Jokowi: Cawe-Cawe Pilpres 2024 Justru Operasi Politik

Oleh Redaksi · 17 Okt, 16.44 WIB



Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana. FOTO/Tangkapan Layar.

BANDA ACEH - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung dugaan operasi Politik untuk menurunkan reputasi dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat isu ijazah.

Denny justru menilai keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 sebagai bentuk operasi politik.

Denny mengatakan, pihaknya membawa persoalan pencalonan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji melalui argumentasi, bukti, saksi, dan keterangan ahli dalam persidangan terbuka untuk umum.

"Yang pertama apakah ada operasi politik? Saya tidak paham kepada siapa pernyataan itu ditunjukkan. Tetapi kalau kami membawa persoalan ini ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi, kami mengajak pihak-pihak beradu argumentasi, logika, nalar dengan bukti, dengan saksi,

dengan ahli di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga fakta-fakta persidangan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dinilai, dilihat bersama-sama," ujar Denny dalam video yang diunggah lewat channel YouTube Denny Indrayana, Sabtu (17/10/2026).

Dia kemudian menuding Jokowi melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Menurut Denny, hal itu terlihat dari perubahan aturan persyaratan pencalonan yang dinilai-nya menguntungkan Gibran.

"Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Yang paling sekarang mengemuka adalah diubahnya pasal-pasal syarat menjadi meng-gibran, disesuaikan dengan kondisi Gibran," kata Denny.

Denny menyoroti dua ketentuan yang menurutnya menjadi persoalan, yakni syarat usia calon wakil presiden dan syarat pendidikan. Dia mengaitkan perubahan ketentuan usia dengan putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk

maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Syarat umur yang harusnya minimal 40 tahun digibrankan melalui putusan Paman Usman untuk keponakan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Syarat pendidikan yang seharusnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat digibrankan melalui pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang semakin terindikasi adalah pasal selundupan demi meloloskan Saudara Gibran menjadi wakil presiden," tutur Denny.

Menurut Denny, perubahan aturan tersebut merupakan bentuk operasi politik yang merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pilpres 2024.

"Itulah sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024," tegasnya.

Denny juga menanggapi pernyataan Jokowi mengenai dugaan upaya menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.

Dia menilai reputasi Gibran tidak perlu diturunkan karena,

menurutnya, kelayakan putra sulung Jokowi itu sebagai wakil presiden sejak awal masih dipertanyakan.

"Yang kedua, apakah betul ada upaya men-downgrade reputasi politik Saudara Gibran dan Pak Jokowi? Untuk Saudara Gibran tanpa di-downgrade sekali pun memang reputasinya masih belum layak," kata Denny.

Denny bahkan menilai Gibran seharusnya tidak dipaksakan menjadi wakil presiden. Dia juga menyinggung kelayakan Gibran ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Beliau seharusnya tidak dipaksakan menjadi wakil presiden. Bahkan untuk menjadi Wali Kota Solo pun sama-sama kita tahu masih perlu dipertanyakan kelayakannya," ujar Denny.

"Jadi tidak ada reputasi yang di-downgrade, memang belum layak untuk menjadi wakil presiden. Reputasi," sambung dia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Jokowi Singgung Operasi Politik di Balik Isu Ijazah Gibran, Sebut Ada Penunggang Gelap

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.35 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyinggung operasi Politik di balik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Hal serupa terjadi pada isu ijazah dirinya yang hingga kini masih ramai menjadi sorotan publik.

Dikutip dari pemberitaan Kaltim Post (Jawa Pos Group), keterangan itu disampaikan oleh Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (16/10). Keterangan tersebut disampaikan merespons isu yang berkembang belakangan ini.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penunggang gelap yang menunggangi lagi. Jadi, menjadi ramai sekarang," kata dia dalam video yang beredar secara luas.

Menurut Jokowi, operasi politik di balik isu ijazah yang menyeret dirinya dan Gibran diluncurkan untuk maksud tertentu. Termasuk diantaranya menurunkan reputasi seseorang.

Namun demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu ambil pusing atas persoalan tersebut.

"Bisa saja memang saya diope-rasi politik untuk men-downgrade

reputasi politik seseorang," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Jokowi turut menyinggung sikap sejumlah partai politik terkait dukungan kepada Gibran untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dia menyoroti PAN, PKB, dan Golkar yang dinilainya belum menyampaikan dukungan secara tegas kepada Gibran.

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai dukungan politik merupakan hak masing-masing partai.

Dia menyebut, tidak ingin mencampuri urusan internal organisasi politik dan meminta semua pihak menghormati hak konstitusional tersebut.

Sebelumnya, isu ijazah Gibran kembali mencuat dan mendapat perhatian secara luas setelah Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil pemilu tersebut. Hakim MK juga menyatakan belum dapat menemukan dokumen setara ijazah SMA atas nama Gibran.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

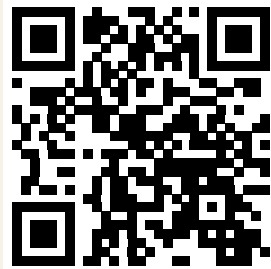
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bentrokan Pemuda di Luwu Timur Memanas, Massa Lepaskan Tembakan Senjata Rakitan

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.18 WIB



Bentrokan dua kelompok pemuda kembali pecah di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (16/10/2026) malam. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Bentrokan dua kelompok pemuda kembali pecah di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (16/10/2026) malam.

Konflik yang dipicu kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelajar itu melibatkan aksi saling lempar batu hingga letusan senjata api rakitan atau papporo.

Bentrokan terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Lampena, sekitar pukul 22.30 Wita. Dua kelompok yang terlibat berasal dari Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, dan Dusun Kau, Desa Lampenai.

Kapolsek Wotu, AKP Simon Siltu, membenarkan bentrokan tersebut dipicu persoalan kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya menewaskan dua pelajar.

“Masih masalah laka lantas (pemicu bentrokan),” kata Simon kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam bentrokan terbaru tersebut.

Kasi Humas Polres Luwu Timur, AKP Husain, menjelaskan ketegangan bermula ketika sekitar 50 pemuda dari Dusun Saluborro berupaya melempar batu ke arah kelompok pemuda Dusun Kau.

Pemuda Saluborro kemudian membakar ban bekas di Jalan Poros Masamba-Wotu. Situasi semakin memanas ketika kelompok tersebut melakukan penyerangan hingga terjadi bentrokan.

Dalam kejadian itu, terdengar letusan senjata api rakitan yang disebut warga setempat sebagai papporo.

“Dusun Saluborro sempat mundur dan terjadi saling lempar batu serta terdengar bunyi letusan senjata rakitan (papporo) dari pemuda Dusun Saluborro,” ujar Husain.

Polisi yang datang ke lokasi berupaya meleraikan kedua kelompok.

Namun, situasi belum terkendali karena sejumlah pemuda justru melempari personel gabungan yang bertugas di lokasi.

“Kelompok pemuda dari Saluborro melakukan pelemparan ke personel Polres gabungan sehingga pihak polisi memberikan tembakan peringatan sebanyak dua kali,” katanya.

Kedua kelompok tetap melakukan aksi saling lempar batu meski polisi telah melepaskan tembakan peringatan. Bentrokan akhirnya dapat diredakan sekitar pukul 02.00 Wita, Sabtu (17/10/2026).

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Polres Luwu Timur juga meminta tambahan personel untuk mengantisipasi bentrokan susulan.

Ketegangan antarkelompok pemuda itu berkaitan dengan kecelakaan yang menewaskan dua pelajar SMA, Fausi (16) dan Suwaid (16), pada Rabu (7/10/2026).

Keduanya mengalami kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, sekitar pukul 20.58 Wita, saat berboncengan sepeda motor.

Kedua pelajar tersebut diduga hendak mendahului kendaraan lain, tetapi kehilangan kendali dan terjatuh di sisi kanan belakang sebuah truk. Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Setelah kejadian, beredar informasi bahwa kedua korban sempat dikejar sekelompok orang sebelum mengalami kecelakaan. Namun, informasi tersebut masih dalam penyelidikan polisi dan belum dipastikan kebenarannya.

AKP Husain menyatakan penanganan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut menjadi kewenangan penyidik lalu lintas.

NASIONAL

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicapot

Oleh Redaksi · 17 Okt, 19.56 WIB



Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto diminta mencopot Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia antrean bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah hingga gangguan pasokan listrik (blackout) di Batam.

Permintaan itu dinyatakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam menyikapi keprihatinan atas persoalan energi belakangan ini.

Ketua YLKI, Niti Emiliana menjelaskan bahwa persoalan tersebut menjadi alarm serius bagi tata kelola energi nasional dan menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.

“YLKI telah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2026 Bapak Prabowo Subianto, untuk meminta evaluasi terhadap kepemimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk Mencopot Menteri ESDM dari jabatannya,” kata Niti dalam keterangan resmi pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Lanjut Niti, sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan sektor energi, Kementerian ESDM harus memastikan keberlangsungan pasokan energi nasional dan

melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Persoalan antrean BBM di berbagai daerah dan gangguan pasokan listrik di Batam tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis.

“Peristiwa tersebut menuntut evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pengawasan, ketersediaan, dan distribusi energi,” kata Niti.

Berikutnya, gangguan energi berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen yang dijamin undang-undang.

YLKI mengingatkan bahwa UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a, menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Sementara itu, Pasal 4 huruf h mengatur hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

“Pemenuhan hak konsumen tidak cukup berhenti pada penyediaan energi, tetapi juga menuntut keandalan layanan, penanganan gangguan, serta pemenuhan hak atas kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Niti.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

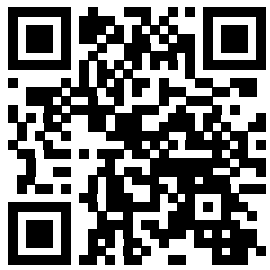
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dirut PT Toba Pulp Lestari Dijemput Paksa dan Jadi Tersangka Korupsi Rp2 Triliun

Oleh Redaksi · 17 Okt, 13.16 WIB



BANDA ACEH - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menangkap sekaligus menetapkan Direktur merangkap Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL), Anwar Lawden (AL), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi transfer pricing periode 2008-2025. Penangkapan tersebut dilakukan di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

"Menetapkan satu orang tersangka pada Kamis, 15 Oktober 2026 terhadap AL selaku Direktur merangkap Corporate Secretary PT TPL," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangannya pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Langkah penjemputan paksa ini diambil lantaran Anwar selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Anang memaparkan, PT TPL awalnya berdiri dengan nama PT Inti Indorayon Utama (IIU) berda-

sarkan Akta Pendirian Nomor 329 tertanggal 29 April 1983, sebelum akhirnya berganti nama menjadi PT TPL melalui Akta Nomor 61 pada 20 Februari 2001, yang bergerak di bidang industri pengolahan bubur kertas (pulp) dan perhutanan.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, PT TPL melakukan penjualan ekspor produk pulp kepada perusahaan afiliasinya, yakni DP MMI, Ltd., serta penjualan lokal kepada pabrik APR.

"Tersangka AL kemudian secara melawan hukum melakukan Under Invoicing dengan mengubah/memanipulasi HS Code produk yang secara karakteristik, kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut seharusnya merupakan produk Dissolving Pulp, namun diubah menjadi produk Paper Grade Pulp/Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP)," jelas Anang.

Padahal, PT TPL berkewajiban menyampaikan dokumen transfer pricing (TP Doc) serta Laporan

SPT Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) di Direktorat Jenderal Pajak untuk diuji kewajaran transaksinya. Namun, laporan yang disampaikan Anwar tidak sesuai dengan kondisi riil.

Lebih lanjut, tersangka AL secara melawan hukum turut memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa pajak (fiscus) agar perusahaan terhindar dari pengawasan. Penelaahan dan review kertas kerja pemeriksaan serta laporan hasil pemeriksaan juga sengaja tidak disandarkan pada audit program yang berlaku. Akibat persekongkolan ini, pemeriksa pajak tidak melakukan uji perbandingan harga maupun pengecekan harga wajar atas laporan yang disampaikan.

"Perbuatan Tersangka AL bersama-sama dengan pemeriksa pajak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp2 triliun," tegas Anang.

Selain menahan Anwar, penyidik juga telah melakukan tindakan lainnya berupa penyelamatan kerugian keuangan negara dan telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebesar Rp 500 juta dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Usai jadi tersangka Anwar dijerat dengan sangkaan pasal Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU 1 /2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 UU 31 / 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU 20 / 2001 tentang Perubahan UU 31 / 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar: Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU 1 / 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Menkes Akui Tak Bisa Hentikan Asap Karhutla dan Cuma Minta Adaptasi, Netizen Respon Begini

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.25 WIB



Menkes Budi Gunadi Sadikin. FOTO/Net.

BANDA ACEH – Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku tak bisa menghentikan asap karhutla dan meminta warga beradaptasi. Pernyataan ini memicu kritik netizen.

Imbauan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memantik perdebatan di media sosial.

Pernyataannya bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak dapat menghentikan sumber asap membuat sejumlah warganet mempertanyakan langkah nyata untuk melindungi warga yang terdampak.

Perbincangan tersebut mencuat setelah pernyataan Budi beredar di media sosial.

Dalam unggahan Instagram @balikpapanku yang dikutip pada Sabtu, 17 Oktober 2026, ia menjelaskan bahwa penanganan dari sisi kesehatan berfokus pada upaya mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat.

"Kami (Kemenkes) tidak bisa menghentikan asapnya. Dengan kondisi alam yang ada saat ini, kita sebagai manusia harus mau beradaptasi," kata Budi.

Pernyataan itu mengundang tanggapan beragam.

Sejumlah pengguna media sosial menilai imbauan menjaga kesehatan perlu disertai penjelasan mengenai upaya perlindungan yang lebih luas, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah dengan paparan asap berkepanjangan.

Budi hanya mengingatkan masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara terdampak asap karhutla.

Warga disarankan tetap berada di dalam rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak.

Bagi masyarakat yang harus keluar rumah, penggunaan masker N95 menjadi salah satu langkah perlindungan yang dianjurkan.

Warga juga diimbau memakai kacamata dan pakaian berlengan panjang untuk membantu mengurangi paparan langsung.

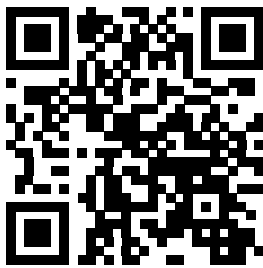
Kemenkes turut menyampaikan upaya penanganan dari sisi pelayanan kesehatan, termasuk pencegahan gangguan kesehatan dan penyediaan obat-obatan di puskesmas yang berada di wilayah terdampak

Sumber: Holopis

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

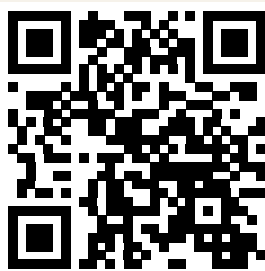
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

PKS Belum Putuskan Hak Angket soal Ijazah Gibran, Dalam Desakan Pemakzulan

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.15 WIB



BANDA ACEH - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan sikap terkait desakan penggunaan Hak Angket DPR untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

PKS mengaku masih mendalami aspirasi masyarakat sebelum menentukan langkah Politik.

Politisi PKS, M. Iqbal, menegaskan partainya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, masih ada saluran kelembagaan di DPR yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui Badan Aspirasi Masyarakat.

“Sampai sekarang belum mengarah ke sana (mengajukan hak angket). Tapi di sana (DPR) ada Badan Aspirasi Masyarakat. Itu ketuanya dari PKS. Kami juga punya fraksi,” kata Iqbal dalam

keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Iqbal mengatakan PKS tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan terkait polemik tersebut.

Namun, seluruh masukan perlu dipelajari sebelum partai menentukan sikap.

“Semuanya sedang mendalami karena ada banyak lagi mungkin yang datang kepada kita dan kami tidak bisa terburu-buru sebagai partai politik,” ujarnya.

Pada Rabu (14/10/2026), PKS menerima rombongan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) bersama mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di kantor DPP PKS.

Dalam pertemuan itu, rombongan tersebut mendorong langkah lanjutan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait

polemik dokumen pendidikan Gibran, termasuk wacana pemakzulan.

Meski telah menerima aspirasi tersebut, PKS belum menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket maupun mekanisme politik lainnya. Iqbal juga belum menyampaikan tenggat waktu pengambilan keputusan partainya.

Dengan demikian, sikap PKS masih sebatas mendalami aspirasi yang berkembang, belum mengarah pada keputusan untuk mengajukan hak angket atau mendorong proses pemakzulan.

Pemerintah Sebut Pemakzulan Tak Bisa Didasarkan pada Perkara MK

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, sebelumnya menyatakan Gibran tidak bisa dimakzulkan melalui perkara

yang berkaitan dengan putusan MK mengenai dokumen pendidikan sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

“Kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden,” kata Syahganda.

Meski demikian, Syahganda menyebut pemerintah masih memantau perkembangan setelah putusan MK tersebut. Ia juga membuka kemungkinan persoalan itu berlanjut melalui jalur politik maupun proses hukum lainnya.

“Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” ujarnya.

NASIONAL

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Oleh Redaksi · 17 Okt, 08.53 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dengan langkah tegas, termasuk jemput paksa apabila syarat hukumnya terpenuhi.

"KPK tidak boleh membiarkan ketegasannya berhenti sebagai pernyataan. Perkara ini menjadi ujian apakah kewajiban memenuhi panggilan penyidik dapat ditegakkan terhadap seorang menteri aktif," kata Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, dikutip Sabtu 16 Oktober 2026.

Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi pada 7 Oktober 2026 dengan alasan agenda internal kementerian. Ketika pemeriksaan dijadwalkan ulang pada 15 Oktober, ia kembali tidak hadir.

Menurut Hamdi, ketidakhadiran berulang menuntut keputusan penyidik yang jelas. KPK perlu memastikan pemeriksaan berlangsung melalui kewenangan yang tersedia dan prosedur yang sah.

"Apabila syarat jemput paksa telah terpenuhi, jabatan Nusron sebagai menteri tidak boleh menjadi alasan untuk menahan langkah penegakan hukum," kata Hamdi.

Hamdi mengatakan, jemput paksa merupakan tindakan menghadirkan seseorang untuk kepentingan pemeriksaan. Pelaksanaannya tidak menetapkan Nusron ber-

salah ataupun mengubah statusnya menjadi tersangka.

Urgensi pemeriksaan Nusron, kata Hamdi, semakin kuat karena KPK menyebut empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron, yakni Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Hubungan tersebut memang belum membuktikan keterlibatan pidana Nusron, tetapi membuat penjelasannya mengenai akses dan aktivitas mereka dalam urusan kementerian menjadi penting bagi penyidikan.

Perkara yang berawal dari dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor juga berkembang pada pendalaman dugaan penerimaan terkait pelayanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.

KPK mengamankan sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian perkara. Asal, tujuan, dan penerima uang tersebut harus dibuktikan secara cermat, termasuk menelusuri pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatannya.

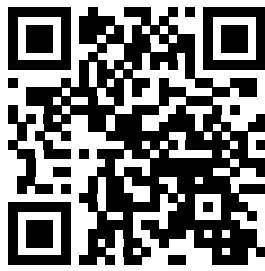
Nusron wajib memberikan penjelasan, dan KPK wajib memastikan pemeriksaan berjalan. Jika syarat hukumnya terpenuhi, jemput paksa harus dilaksanakan.

"Jangan sampai panggilan KPK kehilangan wibawa di hadapan seorang menteri, sementara ketegasan yang diumumkan hanya gertak sambal," kata Hamdi.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Komisi III DPR Kecam Korupsi Dana Bencana BNPB: Iblis Pun Minder!

Oleh Redaksi · 17 Okt, 09.22 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman keras.

Kasus rasuah ini dinilai sangat ironis di tengah masyarakat yang masih berjibaku menghadapi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengaku sangat kecewa atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu," tegas Abdullah kepada wartawan, dikutip Sabtu, 17 Oktober 2026.

Legislator Fraksi PKB itu mendesak KPK mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, anggaran kebencanaan yang semestinya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak tidak

boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam perkembangan kasus tersebut, lima orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP kebencanaan.

Penyidik dilaporkan menyita barang bukti berupa uang Rp3,3 miliar, emas, dan aset kripto senilai sekitar Rp1 miliar.

Abdullah juga meminta KPK memperluas penelusuran terhadap tata kelola anggaran BNPB, termasuk mendalami kemungkinan penyimpangan lain yang terjadi di luar perkara yang tengah ditangani.

Ia mendorong KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit secara menyeluruh pengelolaan keuangan BNPB.

"Saya mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit

ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan," kata Abdullah.

Menurutnya, dugaan praktik korupsi yang disebut berlangsung sejak 2022 harus ditelusuri secara serius. Terlebih, penggunaan dana siap pakai dalam kondisi darurat tetap membutuhkan pengawasan agar celah pengadaan tidak dimanfaatkan untuk memperkaya diri.

Abdullah juga meminta KPK mendalami kemungkinan penerapan pidana mati apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan tersebut membuka kemungkinan pidana mati dalam keadaan tertentu, termasuk korupsi terhadap dana yang dipe-runtukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya dan bencana alam nasional.

"Kan informasinya praktik dugaan korupsi ini terjadi sejak tahun 2022. Maka KPK perlu telusuri, apakah ada tindakan korupsi yang dilakukan saat terjadi bencana nasional pada periode tersebut," ujarnya.

Selain penindakan, Abdullah menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa kebencanaan. Ia meminta KPK menelusuri informasi mengenai pejabat yang diduga menempatkan keluarga atau orang dekat pada perusahaan vendor yang memperoleh proyek penanganan bencana.

Menurutnya, dugaan tersebut harus diperiksa agar proses pengadaan berlangsung transparan dan tidak menjadi sarana memperkaya kelompok tertentu.

Ia pun mendorong penyusunan peta jalan pencegahan korupsi di sektor kebencanaan. Pengawasan, kata dia, perlu dilakukan sejak tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Andreas Hugo Pareira: Tega Sekali Dana Bencana Alam NTT Dikorupsi

Oleh Redaksi · 17 Okt, 09.17 WIB



BANDA ACEH - Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk karhutla dan bencana NTT diduga dikorupsi pejabat BNPB.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Andreas Hugo Pareira mengecam keras dana bencana NTT dikorupsi oleh pejabat BNPB.

"Tega sekali korupsi dana bencana alam. Ada rakyat yang sudah tertimpa bencana dan butuh bantuan dari negara. Ada aparat negara yang tega mengorupsi yang seharusnya digunakan untuk bantu korban bencana," kata Andreas kepada monitorindonesia.com, Sabtu (17/10/2026).

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan dengan DSP pada BNPB. Mereka diduga menerima suap Rp 4,8 miliar, emas 325 gram, serta uang dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat.

Plt Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Achmad Taufik Husein awalnya menyebutkan kasus dugaan korupsi di BNPB ini terbagi dalam dua klaster. Pada klaster pertama, KPK menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai bencana.

Pada klaster kedua, KPK menduga ada suap yang diberikan pihak swasta selaku vendor dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai bencana.

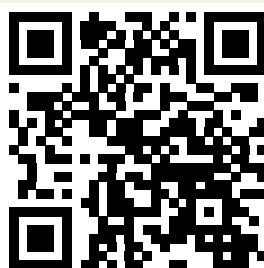
Berikut empat orang yang menjadi tersangka dalam kasus klaster kedua ini:

1. Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu
2. Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB;
3. Syifa Nrika Ghifarini (SNG) selaku pihak swasta
4. Gery Prasetyawan (GER) selaku pihak swasta

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

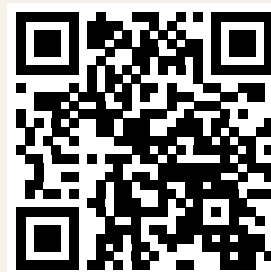
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jokowi Singgung Operasi Politik di Balik Isu Ijazahnya dan Gibran, Ray Rangkuti: Ada Kepanikan

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.01 WIB



Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). FOTO/Net.

BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menduga ada operasi Politik untuk menurunkan reputasi keluarganya di balik polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ray mengatakan pernyataan Jokowi tersebut bukan hal baru.

Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai sosok yang disebut Jokowi sebagai aktor maupun pihak yang menunggangi isu tersebut.

"Kenapa saya enggak terkejut dan tidak heran? Karena ini sudah biasa dilakukan oleh Pak Jokowi.

Dan sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kejelasan siapa aktor dan siapa penunggang gelap yang dimaksud oleh Pak Jokowi sejak 3 tahun yang lalu sudah sering diungkapkan Pak Jokowi kondisi seperti ini," kata Ray saat dihubungi iNews.id, Sabtu (17/10/2026).

Selain itu, Ray menilai pernyataan tersebut menunjukkan kepanikan di lingkungan Jokowi menyusul perkembangan isu ijazah Gibran, khususnya dorongan penggunaan Hak Angket untuk membentuk panitia khusus (pansus).

"Ini saya kira menunjukan bahwa ada kepanikan di lingkungan Pak Jokowi terkait dengan

perkembangan ijazah ini, khususnya dorongan supaya dilakukan hak angket yang hari demi hari makin membesar, dan seperti biasa kala Pak Jokowi kehabisan argumen, nah beliau akan sampaikan pernyataan seperti ini," ucap Ray.

Ray juga menyebut pernyataan tersebut sebagai pola yang telah terlihat sejak Jokowi berkuasa. Dia menyinggung pelaporan ke kepolisian yang, menurutnya, pernah menjadi salah satu respons dalam menghadapi persoalan serupa.

"Kalau dulu, biasanya ada pelaporan-pelaporan ke kepolisian. Itu sebuah pola yang terlihat

sejak Pak Jokowi berkuasa," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi buka suara mengenai polemik ijazah yang kembali menjadi sorotan publik. Dia mengaku santai menghadapi persoalan tersebut, tetapi menyinggung dugaan adanya operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi dirinya dan Gibran.

Jokowi juga menduga isu ijazah tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain. Namun, dugaan mengenai adanya operasi politik itu merupakan pandangan Jokowi yang belum dibuktikan dalam informasi yang disampaikan.

NASIONAL

Detik-Detik Mengerikan Wisatawan Wanita Tewas Jatuh dari Air Terjun di Limapuluh Kota

Oleh Redaksi · 17 Okt, 09.07 WIB



BANDA ACEH – Nasib tragis dialami seorang wisatawan wanita bernama Windy Rahma Putri (25). Korban ditemukan tewas setelah tergelincir dan terjatuh dari puncak Air Terjun Robo, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Jasad korban berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan setelah menggelar operasi pencarian intensif selama sehari semalam di medan yang cukup ekstrem.

sung menerjunkan personel ke lokasi kejadian. Namun, proses pencarian pada malam pertama sempat dihentikan sementara akibat kendala cuaca buruk serta kondisi medan tebing yang sangat terjal dan membahayakan keselamatan petugas.

Pencarian kembali dilanjutkan pada esok harinya hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tersangkut di celah bebatuan sekitar aliran air terjun.

Peristiwa nahas tersebut terekam dalam video amatir milik rekan korban. Insiden bermula saat korban tengah menikmati liburan dan bermain air bersama rekan-rekannya di sekitar tepian puncak Air Terjun Robo.

Nahas, diduga akibat pijakan batuan yang licin, korban tergelincir dan jatuh terhempas dari ketinggian tebing yang diperkirakan mencapai 25 meter. Rekan korban yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan insiden ke pihak pos SAR terdekat.

Tim dari Pos SAR Limapuluh Kota yang menerima laporan lang-

"Operasi pencarian sempat terkendala medan yang sangat licin dan terjal. Korban akhirnya berhasil ditemukan tersangkut di area bawah air terjun dalam kondisi meninggal dunia," kata Koordinator Pos SAR Limapuluh Kota, Roni Nur, Jumat (16/10/2026).

Usai berhasil dievakuasi dari dasar tebing dengan peralatan high angle rescue, jenazah korban langsung dibawa menuju rumah duka di Kabupaten Padang Pariaman atas permintaan keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

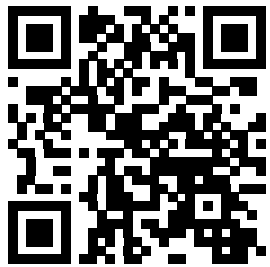
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Ternyata Ini Alasan KPK Belum Putuskan Jemput Paksa Nusron Wahid

Oleh Redaksi · 17 Okt, 09.28 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan untuk menjemput paksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penyidik masih mengevaluasi alasan penundaan pemeriksaan yang diajukan Nusron.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru mengatur mekanisme pemanggilan saksi hingga dua kali sebelum penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa.

“Pemanggilan saudara NW, apakah ada akan dilakukan perintah membawa tadi. Sesuai dengan ketentuan di Hukum Acara, ketika penyidik melakukan pemanggilan itu diberikan kewenangan sebanyak dua kali, khususnya di KUHP baru,” ujarnya pada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Dia menjelaskan, pada pemanggilan pertama, penyidik dapat melanjutkan ke pemanggilan kedua jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Sebaliknya, jika saksi tidak hadir dengan alasan yang dapat diterima, seperti sakit disertai surat keterangan dokter atau memiliki agenda lain yang berbenturan dengan jadwal pemeriksaan, pemanggilan pertama masih dapat berlaku.

Achmad mencontohkan, alasan sakit tanpa surat keterangan dokter tidak memenuhi syarat sebagai alasan yang patut dan wajar. Dalam kondisi tersebut, penyidik dapat melanjutkan proses dengan pemanggilan kedua.

Jika saksi kembali tidak hadir setelah pemanggilan kedua, penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa sesuai ketentuan hukum acara yang baru.

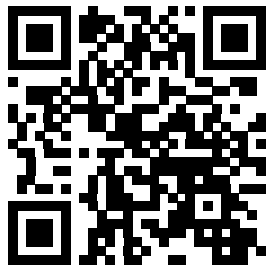
Dalam kasus Nusron, KPK sebelumnya menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan yang diajukan oleh Menteri ATR/BPN tersebut.

“Nah terhadap saudara NW, betul tanggal 14 kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan kepada

KPK untuk melakukan penundaan,” tuturnya.

Achmad menambahkan, tim penyidik akan terlebih dahulu mengevaluasi alasan penundaan yang disampaikan Nusron. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk melayangkan panggilan kedua atau menjadwalkan ulang pemeriksaan.

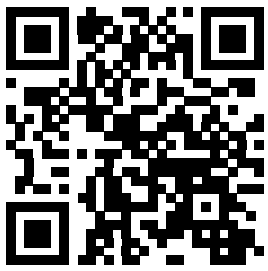
“Sehingga kemudian itu akan dianalisa oleh tim penyidik apakah dianggap alasan tersebut patut dan wajar karena memang ada mencantumkan agenda kegiatan yang bersamaan begitu. Nah itu akan kemudian dievaluasi lagi. Apakah tadi sudah masuk untuk menerapkan panggilan kedua atau akan dilakukan reschedule atau jadwal ulang untuk yang bersangkutan,” katanya.



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru

ACEH

Kasus Dugaan Perusakan Hutan Aceh Singkil Sudah Setahun Lebih, Peserta Rakor Wali Nanggroe Soroti Kinerja Aparat

Oleh Redaksi · 17 Okt, 07.00 WIB



Rapat Koordinasi Lembaga Wali Nanggroe bersama instansi terkait dalam rangka optimalisasi Dinul Islam melalui penegakan Qanun Syariat Islam, yang berlangsung pada 13 Oktober 2026 di Kampus STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil. Rapat Koordinasi ini dihadiri unsur Majelis Syura Wali Nanggroe, Wakil Bupati Aceh Singkil, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, Kasat Reskrim yang

ACEH SINGKIL - Penanganan kasus dugaan perusakan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Singkil kembali menuai sorotan. Meski telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 24 Agustus 2026, perkara yang diduga melibatkan penggunaan alat berat jenis excavator dan pembakaran kawasan tersebut dinilai belum memberikan kejelasan kepada publik mengenai penetapan tersangka maupun status alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara.

Persoalan itu mencuat dalam Rapat Koordinasi Lembaga Wali Nanggroe bersama instansi terkait dalam rangka optimalisasi Dinul Islam melalui penegakan Qanun Syariat Islam, yang berlangsung pada 13 Oktober 2026 di Kampus STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil.

Dalam forum yang dihadiri unsur Majelis Syura Wali Nanggroe, Wakil Bupati Aceh Singkil, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, Kasat Reskrim yang mewakili Kapolres Aceh Singkil, serta sejumlah instansi terkait tersebut, peserta berinisial AS secara terbuka mempertanyakan keseriusan penanganan kasus dugaan perusa-

kan kawasan hutan yang dilaporkan sejak April 2025.

AS menilai, lamanya proses penanganan perkara tanpa kejelasan perkembangan yang diketahui publik menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penyidikan. Ia meminta agar perkara tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai mengenai langkah-langkah hukum yang telah dilakukan penyidik.

Sprindik Terbit, Publik Menunggu Kejelasan Penyidikan

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum tersebut, perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sp.Sidik/51/VIII/RES.5.6./2026-/Reskrim, tertanggal 24 Agustus 2026.

Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penanganan kasus tersebut. Namun, menurut AS, publik masih menunggu penjelasan mengenai perkembangan penyidi-

kan, pihak-pihak yang telah diperiksa, status alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara, serta kemungkinan penetapan tersangka apabila bukti yang dipersyaratkan hukum telah terpenuhi.

AS juga mempertanyakan mengapa alat berat excavator yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut belum diketahui secara jelas status pengamanannya. Ia meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan, termasuk apakah alat berat tersebut telah ditemukan, diamankan, atau dikenai tindakan penyitaan sesuai ketentuan hukum.

Dalam pandangan AS, perkara yang berkaitan dengan dugaan perusakan kawasan hutan tidak semestinya kehilangan perhatian hanya karena proses penanganannya berlangsung lama. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai arah penanganan perkara tersebut.

Pergantian Pejabat, Pertanyaan

tentang Kesenambungan Penanganan Perkara

AS juga menyoroti bahwa selama proses penanganan perkara berlangsung, terdapat pergantian pejabat yang menangani perkara di lingkungan Polres Aceh Singkil.

Menurut keterangan AS, penanganan perkara sebelumnya dilakukan oleh AKP Darmi Arianto Manik, S.H., kemudian dilanjutkan oleh AKP Muhammad Nur, S.H. Sementara itu, pada tingkat Unit Tipidter, penanganan perkara disebut sebelumnya berada di bawah Ipda Sutrisno dan selanjutnya dilanjutkan oleh Aiptu Suharli, S.H.

Pergantian pejabat tersebut, menurut AS, menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan penanganan perkara dan perkembangan penyidikan dari waktu ke waktu.

AS bahkan menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam proses penanganan perkara serta menduga kemungkinan adanya hubungan atau kepentingan pihak tertentu yang menyebabkan prosesnya ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Wali Kota Banda Aceh Buka Lomba Apresiasi Bunda PAUD Gampong se-Kecamatan Kuta Alam

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.15 WIB



BANDA ACEH - Bunda PAUD Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal secara resmi membuka kegiatan Lomba Apresiasi Bunda PAUD Gampong se-Kecamatan Kuta Alam di Hotel Kyriad Muraya, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Banda Aceh Dessy Maulida, Ketua DWP Siti Hajar, Bunda PAUD Kecamatan Kuta Alam Rosni Darwis, para Bunda PAUD Gampong, pengelola dan pendidik PAUD se-Kecamatan Kuta Alam.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai momentum untuk menghargai pengabdian, melihat praktik-praktik baik, saling belajar, dan memperkuat semangat bersama dalam membangun pendidikan anak usia dini (PAUD).

Illiza mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama dan memiliki potensi besar di Kuta Alam. Saat ini terdapat 53 lembaga PAUD yang terdiri dari 27 TK, 11 Kelompok Bermain, 11 SPS, dan empat Daycare. "Dan dari 11 gampong yang ada di Kuta Alam, semuanya telah memiliki PAUD Gampong."

Pada kesempatan tersebut, Illiza menitikpkan tiga pesan penting.

Pertama, Bunda PAUD harus menjadi penggerak pendidikan anak usia dini di gampong dengan mengenal kondisi anak-anak, berkomunikasi dengan guru dan orang tua, serta mendorong tumbuh kembang anak dengan akhlak yang baik.

Kedua, Bunda PAUD harus ikut memastikan seluruh PAUD di wilayahnya mendapat perhatian, baik PAUD Gampong maupun PAUD swasta, dengan tetap berkoordinasi dengan Keuchik, Bunda PAUD Kecamatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan kader Posyandu, PKK, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat, karena pendidikan anak usia dini berkaitan erat dengan kesehatan, gizi, pola asuh, dan perlindungan anak.

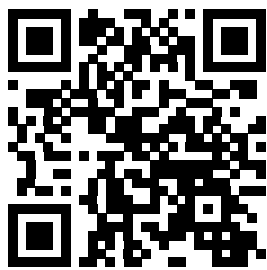
Illiza pun berharap lomba ini tidak hanya dimaknai dari siapa yang menjadi juara, karena semua Bunda PAUD yang hadir merupakan juara yang telah peduli terhadap masa depan anak-anak.

"Apa yang Ibu-Ibu lakukan untuk anak-anak kita, insyaallah akan menjadi amal jariyah yang nilainya jauh lebih besar dari sebuah piala atau piagam," ujarnya.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

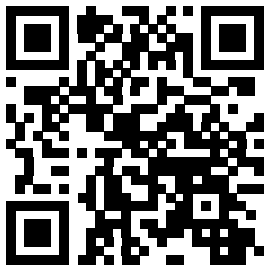
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Putra Aceh Brigjen Mahesa Fitriadi Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda

Oleh Redaksi · 17 Okt, 06.20 WIB



Brigjen TNI Mahesa Fitriadi resmi menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) setelah mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Aula AH Nasution Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jum'at (16/10/2026). FOTO/Dok. Pangdam IM.

JAKARTA – Brigjen TNI Mahesa Fitriadi resmi menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) setelah mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Aula AH Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menggantikan Mayjen TNI Joko Hadi Susilo yang mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) Sahli Tingkat III Manajemen Bidang Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) Kasad.

Dalam amanatnya, Kasad menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara TNI AD dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, insan media, serta masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik merupakan kunci untuk memastikan berbagai program dan kebijakan TNI AD dapat dipahami secara luas serta memberi-

kan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kasad juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, kepada para pejabat baru, ia berpesan agar senantiasa memahami dinamika perkembangan situasi nasional maupun global, memperkuat sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi.

Selain itu, Kasad mengingatkan pentingnya menjaga kesiapsiagaan satuan agar mampu menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. Profesionalisme, soliditas, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AD secara optimal.

Penunjukan Brigjen TNI Mahesa Fitriadi sebagai Pangdam Iskandar Muda merupakan

amanah dan tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Provinsi Aceh. Dengan pengalaman penugasan dan perjalanan karier yang dimilikinya, kepemimpinannya diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas Kodam Iskandar Muda sekaligus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh komponen masyarakat.

Brigjen TNI Mahesa Fitriadi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1995. Perwira tinggi TNI AD kelahiran Kota Bakti, Aceh, 28 Oktober 1973, ini memiliki latar belakang pendidikan militer yang beragam, di antaranya Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Tiongkok pada 2012 serta Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) pada 2019. Ia juga menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Administrasi Publik pada 2004 dan pendidikan magister Manajemen pada 2022.

Sepanjang perjalanan kariernya, Brigjen TNI Mahesa Fitriadi telah

mengemban berbagai jabatan strategis, baik di satuan kewilayahan maupun di tingkat komando dan staf.

Pengalamannya di lingkungan Kodam Iskandar Muda antara lain meliputi jabatan Komandan Detasemen Intelijen Kodam Iskandar Muda, Komandan Kodim 0104/Aceh Timur, Wakil Asisten Teritorial Kasdam Iskandar Muda, Komandan Kodim 0101/ serta Asisten Teritorial Kasdam Iskandar Muda.

Sebelum dipercaya menjabat Pangdam Iskandar Muda, ia mengemban tugas sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda sejak Februari 2026.

Dengan bekal pengalaman penugasan, pendidikan militer, serta pemahaman terhadap karakteristik wilayah Aceh, kepemimpinan Brigjen TNI Mahesa Fitriadi diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan berbagai upaya yang telah dilaksanakan Kodam Iskandar Muda.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

AKBP Budi Darma Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Santri Dayah Wakaf Barbate

Oleh Hamdani · 17 Okt, 08.12 WIB



AKBP Budi Darma, S.H., Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Aceh, menyampaikan penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada santri kelas MA Dayah Wakaf Barbate

ACEH BESAR — Kepala Subdirektorat 2 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Aceh, AKBP Budi Darma, S.H., memberikan penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada santri kelas Madrasah Aliyah (MA) Dayah Wakaf Barbate, Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung usai pelaksanaan ibadah shalat Jum'at tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026, dengan judul "Strategi Mitigasi Penanganan Narkoba Berbasis Partisipatif di Wilayah Hukum Polda Aceh."

Pelaksanaan kegiatan pada siang hari menyesuaikan agenda mendarak AKBP Budi Darma bersama Asisten I Sekretariat Daerah Aceh pada pukul 09.00 WIB di Kantor Gubernur Aceh.

Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para santri mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

Melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, para santri diberikan pemahaman tentang pentingnya membentengi diri dari pengaruh negatif narkoba serta meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan pergaulan.

Para santri juga didorong untuk berani menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila mengetahui indikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan baik dari pengurus Yayasan Wakaf Barbate Islamic Center (YWBIC). Sambutan disampaikan langsung oleh Drs. H. Anwar Hasyim, M.Pd. Turut hadir Syaifuddin Ibrahim selaku Pembina YWBIC serta Rahman Zainal selaku Wakil Ketua YWBIC. Erdi Muallim, Kepala Tata Usaha Dayah dan Khaidir, Pengurus YWBIC. Hadir juga dalam rombongan AKBP Budi Darma adalah AKP Muhammad Yunus yg juga pengurus Yayasan Wakaf BIC.

Ketua Umum YWBIC, Prof. Dr. Sofyan A. Gani, M.A., berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pembelajaran baru bagi para santri untuk mengenali bahaya penyalahgunaan narkoba dan memahami pentingnya menjaga diri dari pengaruh zat terlarang tersebut.

Melalui kegiatan ini, para santri diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba, tetapi juga mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

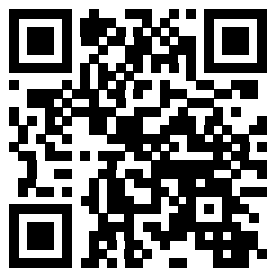
Implementasi proyek perubahan ini menjadi langkah untuk memperkuat strategi penanganan narkoba berbasis partisipasi dengan melibatkan lembaga pendidikan keagamaan, santri, pengasuh dayah, dan masyarakat dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Aceh.

Alhamdulillah, pada kesempatan tersebut, rombongan AKBP Budi Darma membawa berupa: beras 5 karung, Indomie 4 kotak, telur 300 butir dan air mineral 3 kardus. []

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Wali Kota Sabang Buka FASI 2026, Tekankan Pentingnya Pembinaan Generasi Qurani

Oleh Redaksi · 17 Okt, 09.55 WIB



Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menekankan pentingnya pembinaan generasi Qurani yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai bekal membangun masa depan Kota Sabang. FOTO/Dok. Pemkot Sabang.

SABANG – Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menekankan pentingnya pembinaan generasi Qurani yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai bekal membangun masa depan Kota Sabang.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Kota Sabang Tahun 2026 di halaman Masjid Agung Babussalam, Jumat (16/10) malam.

FASI Kota Sabang Tahun 2026 berlangsung pada 16-18 Oktober 2026 dengan enam kategori lomba, yakni tahfiz 1 juz, tartil Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, ceramah agama, azan, dan mewarnai. Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuan keagamaan sekaligus menumbuh-

kan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak dini.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sabang menyampaikan bahwa FASI tidak hanya menjadi ajang untuk memperebutkan juara, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak di Kota Sabang.

“Kami yakin adik-adik semuanya bukan hanya memperebutkan juara, tetapi hadir kemari dengan keyakinan untuk meningkatkan keimanan,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan bahwa kemajuan Kota Sabang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan masyarakat, tetapi juga oleh keimanan dan ketakwaan generasi muda. Menurutnya, nilai-nilai agama perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak tumbuh men-

jadi pribadi yang baik dan mampu membawa daerah ke arah yang lebih baik.

“Sabang ini tidak akan maju dengan pintarnya manusia saja. Yakinilah, Sabang ini akan maju dengan istiqamahnya anak-anak kita, dengan peningkatan ketakwaan dan keimanan dari anak-anak kita semua,” katanya.

Wali Kota Sabang juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, guru mengaji, pimpinan dayah, pimpinan pesantren, serta tempat-tempat pengajian di Kota Sabang yang telah membina dan mendidik anak-anak hingga dapat mengikuti festival tersebut.

Di akhir sambutan, Zulkifli berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat melahirkan generasi muda yang mencintai Al-Qur'an, mengamalkan

nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki akhlak yang baik.

“Harapan kita semua, semoga akan lahir anak-anak Sabang yang baik, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Sabang yang lebih baik ke depan,” tutupnya.

Pembukaan FASI Kota Sabang Tahun 2026 turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Sabang, serta jajaran Pemerintah Kota Sabang, unsur terkait lainnya dan masyarakat.[]

ACEH

Subuh Keliling di Masjid Raya Baiturrahman, Kapolda Aceh Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat

Oleh Redaksi · 17 Okt, 08.34 WIB



BANDA ACEH, Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddy Setiawan melaksanakan kegiatan Salat Subuh Keliling (Suling) di Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu (17/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pendekatan humanis, silaturahmi, dan komunikasi langsung dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut diikuti Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Iskandar ZA dan sejumlah pejabat utama Polda Aceh. Selain melaksanakan ibadah berjamaah, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus membangun ruang komunikasi yang terbuka dalam menyikapi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menjelaskan, Salat Subuh Keliling merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang diarahkan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang oleh jajaran kepolisian di wilayah, mulai dari tingkat Polda hingga Polsek. Melalui pendekatan ini, personel Polri diharapkan dapat menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, mengidentifikasi permasalahan, serta mengupayakan langkah penyelesaian secara

tepat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

“Pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilakukan melalui patroli dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang baik, kepercayaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, kehadiran Polri di tengah masyarakat harus mampu memberikan ruang dialog, sehingga berbagai persoalan dapat diketahui dan ditindaklanjuti sejak dini,” ujar Joko.

Ia menambahkan, kegiatan Salat Subuh Keliling selaras dengan tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’, yang menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat.

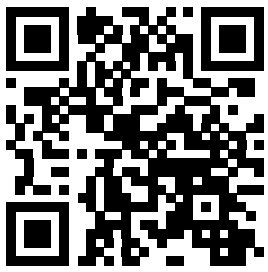
Melalui kegiatan keagamaan dan silaturahmi yang berkelanjutan, Polda Aceh berkomitmen memperkuat kemitraan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar tagline, melainkan komitmen untuk membangun hubungan yang terbuka, responsif, dan saling percaya. Dengan komunikasi dan kerja sama yang berkesinambungan, kami berharap situasi kamtibmas di Aceh senantiasa terpelihara dengan aman, tertib, dan kondusif,” tutup Joko.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

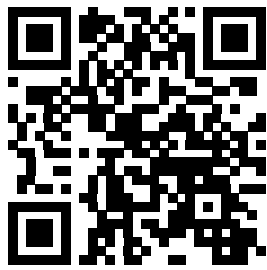
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

8 BERITA

EKONOMI

Viral! Owner SPBU Bali Mengadu Sambil Menangis ke Koster, Gubernur Cuma Melengos

Oleh Redaksi · 17 Okt, 20.30 WIB



BANDA ACEH – Owner SPBU di Bali menangis meminta bantuan kepada Wayan Koster untuk mengatasi antrean BBM. Namun, gestur Gubernur Bali itu menuai sorotan netizen.

Sikap Gubernur Bali Wayan Koster kembali menjadi sorotan setelah video dirinya saat menerima keluhan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Renon, Denpasar, viral di media sosial.

Di tengah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang mengular dan pegawai yang kelelahan, pemilik SPBU itu meminta bantuan personel tambahan sambil mengungkapkan kekhawatirannya.

Namun, gestur Koster yang beberapa kali terlihat memalingkan wajah justru memancing kritik warganet.

Peristiwa tersebut terjadi saat Koster meninjau kondisi pelayanan BBM di Bali pada Jumat (16/10/2026).

Pemilik SPBU meminta bantuan armada TNI-Polri untuk membantu mengurai antrean sekaligus

meringankan beban pekerja yang harus melayani lonjakan pembeli.

Dengan nada penuh kekhawatiran, perempuan yang disebut sebagai pemilik SPBU itu menyampaikan bahwa jumlah pegawainya terbatas.

Ia mengaku kasihan melihat para pekerja yang harus menghadapi situasi tersebut.

“Mohon bantuannya, kirim armadanya, kasihan pegawai saya, cuman 30 orang, sudah tua-tua semua, kasihan,” ujarnya dalam video yang beredar.

Namun, momen pengaduan tersebut justru menjadi perbincangan karena Koster beberapa kali terlihat menoleh ke arah lain ketika pemilik SPBU berbicara.

Gestur itu memicu penilaian negatif dari sejumlah warganet yang mempertanyakan cara gubernur merespons keluhan di tengah situasi sulit.

Akun @cariacosa mempertanyakan sikap Koster melalui komentar, “Diajakin ngomong kok nolah noleh sih koster?”

Kritik serupa disampaikan akun

@BoraNora613 yang menulis, “Dia gak bisa hargai rakyat.

Owner SPBU Bali menangis meminta bantuan kepada Koster, tetapi gestur gubernur menuai kritik warganet. (Foto: X)

Rekaman tersebut memperpanjang polemik mengenai penanganan antrean BBM di Bali.

Sebab, sebelum pemilik SPBU menyampaikan keluhannya, Koster lebih dahulu menjadi sorotan setelah beradu argumen dengan seorang operator SPBU di Jalan Diponegoro, Denpasar, pada Rabu malam (14/10/2026).

Dalam kejadian sebelumnya, seorang operator SPBU menangis ketika mengungkapkan kelelahan akibat harus terus melayani konsumen di tengah antrean BBM.

“Saya bukan robot, saya juga capek, Pak,” ujar pegawai tersebut.

Keluhan itu menggambarkan tekanan yang dihadapi pekerja ketika antrean terus berdatangan, sementara waktu istirahat dan tenaga mereka terbatas.

Dalam rekaman yang beredar, Koster meminta pegawai tersebut

diam dan menyuruh agar dirinya diusir.

Sikap itu menuai kritik karena dinilai tidak menunjukkan respons yang diharapkan sebagian warganet terhadap pekerja yang sedang mengeluhkan kelelahan.

Koster juga sebelumnya meminta petugas SPBU tetap melayani konsumen meskipun kondisi fisik mereka sudah lelah.

“Enggak usah, jangan ngeluh. Layani konsumen. Walaupun capek, ya layani. Enggak boleh merasa capek,” kata Koster.

Pernyataan tersebut kembali dipersoalkan setelah muncul pengakuan mengenai terbatasnya jumlah pekerja dan kebutuhan bantuan tambahan di lapangan.

Ariskaa Novitha Sari turut mengungkapkan pengalaman lembur operator SPBU melalui media sosial.

Ia menceritakan pekerja yang bertugas sejak pukul 14.00 hingga sekitar pukul 00.30, lalu kembali melayani konsumen sampai pukul 07.00 pagi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

TEKNOLOGI

How AI Photo Editing Is Changing Digital Creativity

Oleh Redaksi · 17 Okt, 10.15 WIB



BANDA ACEH - Digital creativity has become more accessible as photo-editing tools continue to evolve. What once required advanced software skills and hours of manual adjustments can now be achieved through simpler editing interfaces and AI-assisted features. From improving lighting to adding imaginative visual effects, modern tools are giving everyday users new ways to express themselves through images.

This change is especially visible on social media, where profile pictures, creative portraits, and visually engaging posts have become an important part of online communication. Rather than relying entirely on complex editing techniques, users can experiment with different styles and discover what best reflects their personality.

The Growing Appeal of Creative Photo Effects

Photo effects have always played a role in visual storytelling. Filters can change the mood of an image, emphasize particular colors, or create an atmosphere that would be difficult to capture directly with a camera.

Today, these effects extend beyond basic color adjustments. Creators can experiment with glowing light, dreamy backgrounds, fantasy-inspired details, and other visual elements. Such edits are popular for personal portraits, themed photography, digital artwork, and short-form social media content.

The most effective edits usually have a clear purpose. A subtle glow may help create a calm, elegant portrait, while a more dramatic effect can suit a fictional character or a playful online post. Understanding the intended mood

before editing makes it easier to choose the right visual treatment.

Understanding the Angel Halo Filter Trend

One example of creative portrait editing is the angel halo filter, which adds an angelic visual element to a photograph. A halo can give a portrait a dreamy, symbolic, or fantasy-inspired appearance without requiring the subject to wear a physical accessory.

This style can work for personal selfies, artistic portraits, themed social media posts, and imaginative character designs. The result depends on how the effect fits the original photograph, including the subject's position, the available lighting, and the overall composition.

For a convincing result, proportion matters. A halo that is too large or too bright can distract from the face, while a more restrained effect may blend naturally into the image. Matching the glow to the photograph's lighting can also help the final edit feel more cohesive.

How to Make Photo Effects Look More Natural

Applying an effect is only one part of the editing process. A few practical choices can make the finished image look more polished.

Start with a clear photograph. Images with good focus and visible facial features generally provide a better starting point for portrait editing. A simple background can also make decorative effects easier to appreciate.

Pay attention to lighting. Consider the direction and warmth of the original light.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

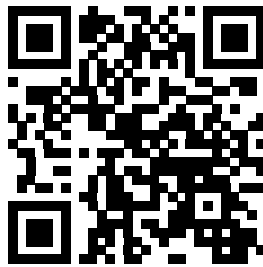
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Anies Baswedan Terima Freedom of the City of London: Merdeka!

Oleh Redaksi · 17 Okt, 09.13 WIB



BANDA ACEH – Anies Baswedan menerima penghargaan sipil Freedom of the City of London dalam upacara di Guildhall, London, Jumat (16/10/2026). Ia pun menerima penghargaan tersebut dengan ucapan merdeka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu kemudian disambut sebagai “Citizen of London” pada akhir upacara. Prosesi tersebut mengikuti tradisi yang telah berlangsung sejak abad ke-13 di balai kota bersejarah yang menjadi pusat pemerintahan City of London selama enam abad.

Anies menerima penghargaan setelah dinominasikan Alderman Alastair King saat menjabat Lord Mayor of London bersama Alderman Gregory Jones KC. Nominasi tersebut disetujui Court of Common Council, badan tertinggi City of London Corporation, pada Juni 2025.

Dalam daftar persetujuan yang sama, terdapat nama aktris peraih

Oscar Cate Blanchett dan kapten tim rugbi Inggris Maro Itoje.

Freedom of the City of London merupakan salah satu tradisi sipil tertua di dunia yang masih berlangsung hingga kini. Catatan sejarah menyebut tradisi tersebut telah ada sejak 1237, ketika status freeman berkaitan dengan hak untuk berdagang di Kota London.

Saat ini, penghargaan itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai berkontribusi terhadap kehidupan publik. Selain Winston Churchill dan Nelson Mandela, daftar penerimanya mencakup Desmond Tutu, Lee Kuan Yew, Stephen Hawking, Sir Tim Berners-Lee, JK Rowling, Harry Kane, Ed Sheeran, serta Andrew Lloyd Webber yang menerimanya pada pekan sebelumnya.

Upacara penganugerahan dipimpin Alderman Vincent Keaveny, Lord Mayor of London periode 2021–2022, yang bertindak sebagai Representative Lord Mayor. Keaveny dan Anies sebelumnya pernah bertemu dalam rangkaian

kunjungan resmi antara London dan Jakarta.

Pada Mei 2022, Keaveny menerima Anies di Mansion House, kediaman resmi Lord Mayor. Sebulan kemudian, Anies menjamu Keaveny di Balai Kota Jakarta.

Dalam sambutannya, Anies berseloroh London unggul satu kunjungan setelah upacara tersebut. Dia juga menyampaikan niat untuk membalas kunjungan itu.

Sementara itu, Alderman Gregory Jones, salah satu pengusul penghargaan, baru kembali dari Jakarta setelah menjadi bagian dari delegasi Lord Mayor pada Oktober 2025. Anies menghadiri upacara bersama istrinya, Fery Farhati.

Dalam pidato singkat berbahasa Inggris setelah menerima penghargaan, Anies mengaitkan makna Freedom of the City of London dengan gagasan mengenai tanggung jawab negara kepada warganya.

“Di negara saya, sepanjang hidup saya berpendapat bahwa republik bukanlah sebuah harapan. Republik adalah sebuah janji. Para pendiri bangsa kami tidak menulis ‘kami berharap’. Mereka menulis ‘kami akan’: melindungi setiap warga negara, mencerdaskan setiap anak, menghadirkan kesejahteraan bagi semua. Janji adalah utang,” ujarnya.

Anies juga menyoroti kemajemukan London dan Indonesia. Menurut dia, kedua wilayah memiliki keberagaman yang perlu diiringi upaya menjaga persatuan.

“Lebih dari tiga ratus bahasa dituturkan di London. Tujuh ratus bahasa dituturkan di Indonesia, dan sebagian besar bertemu di Jakarta. Kita sama-sama tahu bahwa kebinekaan adalah karunia Tuhan, dan persatuan adalah hasil kerja tangan manusia,” ungkapnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

AMERIKA

Baru 5 Hari Menjabat, Akhirnya Jubir Trump Mundur Usai Ketahuan Tak Lulus Ujian Advokat

Oleh Redaksi · 17 Okt, 09.04 WIB



BANDA ACEH -Belum genap sepekan menjabat, Katie Zacharia harus meninggalkan posisinya sebagai sekretaris pers Gedung Putih.

Polemik mengenai kualifikasinya sebagai pengacara menjadi sorotan media hingga Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyarankannya untuk mempertimbangkan kembali jabatan tersebut.

Trump mengaku tidak ingin Zacharia terus menghadapi tekanan dari media. Ia juga menyebut tidak terburu-buru mencari pengganti Zacharia, yang sebelumnya ditunjuk untuk menggantikan Karoline Leavitt.

“Saya rasa Katie tidak seharusnya menderita seperti yang dialaminya di tangan pers,” kata Trump kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Putih, dikutip dari Al-Jazeera, Sabtu 17 Oktober 2026.

Trump mengaku telah meminta Zacharia untuk memikirkan kembali keputusannya bertahan di posisi tersebut.

Kontroversi ini bermula dari pertanyaan mengenai latar belakang profesional Zacharia. Meski merupakan lulusan sekolah hukum Pepperdine University di California, ia mengakui tidak lulus ujian advokat di negara bagian tersebut.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis, Zacharia juga membenarkan bahwa dirinya tidak

lulus ujian untuk memperoleh izin praktik hukum.

Zacharia dilaporkan gagal dalam ujian advokat California pada 2011. Ia beralasan saat itu tengah mempersiapkan pernikahan dan pindah ke China untuk mengikuti pekerjaan suaminya. Zacharia juga membantah pernah secara langsung menyebut dirinya sebagai advokat, meskipun sebelumnya pernah mengatakan bekerja sebagai pengacara korporasi di Beijing selama tiga tahun.

Persoalan tersebut berlanjut setelah organisasi Campaign for Accountability mengajukan pengaduan kepada otoritas advokat California pada 14 Oktober 2026. Organisasi itu meminta penyelidikan atas dugaan penggunaan gelar pengacara tanpa lisensi yang sah. Sementara itu, Gedung Putih membela Zacharia dan menyebutnya sebagai sosok yang memenuhi kualifikasi untuk menjalankan tugasnya.

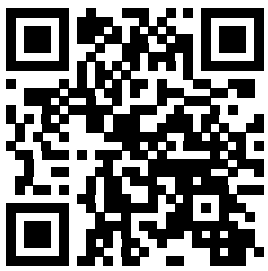
Masa jabatan Zacharia hanya berlangsung lima hari, lebih singkat dibandingkan Anthony Scaramucci yang menjabat sebagai direktur komunikasi Gedung Putih selama 10 hari pada periode pertama pemerintahan Trump.

Kontroversi tersebut pun menjadi tantangan tambahan bagi Trump ketika Partai Republik bersiap menghadapi pemilihan yang akan menentukan peta kekuatan Politik di Kongres AS.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Oleh Redaksi · 17 Okt, 08.56 WIB



Oleh:Rosadi Jamani

SANTRI kalau ketemu kiai biasanya minta amalan. Ketemu Nusron Wahid, minta ilmu menghilang dari radar KPK. Sebab, Kamis, 15 Oktober 2026, Menteri ATR/BPN ini kembali memper-tontonkan kesaktian membuat ilmu ninja Jepang, tuyul, dan pesulap Las Vegas ramai-ramai mengajukan pensiun dini.

KPK memanggil, Nusron tak datang. Surat melayang, orangnya mengambang. Penyidik menunggu, angin Kuningan ber-lalu. Ini pemanggilan saksi atau acara mencari makhluk gaib di Gunung Kawi?

Pada 7 Oktober lalu, Nusron sudah mangkir dari panggilan per-tama. Surat dikirim sejak pekan sebelumnya, tetapi alasannya ada agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Ketua KPK Setyo Budiyanto sampai berkomentar, Nusron kurang bisa mengatur waktu.

Kurang mengatur waktu? Waduh! Surat sudah datang seminggu sebelumnya, bukan diki-

rim menggunakan burung merpati yang tersesat ke planet Mars.

Jangan-jangan kalender Nusron berbeda dengan kalender nasional. Di kalender rakyat ada Senin sampai Minggu, di kalender beliau mungkin cuma ada Senin, Selasa, dan Agenda Internal.

KPK kemudian memanggilnya lagi pada Kamis tadi. Setyo mengingatkan janji Nusron pada 18 September 2026, bahwa ia akan menghormati, mendukung, dan membantu proses hukum.

“Ini kesempatan untuk memper-jelas,” kata Setyo.

Namun, hingga siang sampai sore, batang hidung Nusron tak terlihat. Tidak ada konfirmasi kedatangan.

Publik pun menunggu sambil bertanya-tanya, apakah surat pang-gilan itu sudah sampai, atau malah dibajak alien sedang melakukan penelitian tentang MBG?

Netizen di X mulai berteriak. Ada menyebutnya pengecut, ada meminta agar langsung dicokok sebelum menghilang tak berbekas. Ada pula membandingkannya

dengan pejabat lain langsung dico-pot setelah terkena OTT.

Kasusnya bukan perkara kehila-ngan sandal jepit di masjid. OTT pada 14 September 2026 di Jabo-detabek menyita uang tunai Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan tersangka.

Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. Namun, Nusron sendiri dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka. Status saksi bukan bukti bersalah, tetapi kehadiran untuk memberikan keterangan penting bagi proses hukum.

Lalu, mengapa suasananya seperti pertunjukan sirkus? KPK punya Gedung Merah Putih, penyidik, surat panggilan, dan kewenangan hukum.

Namun, publik melihat drama menunggu yang episodenya lebih panjang daripada sinetron azab “Menteri Menghilang, Penyidik Merana.”

Singa pemberantas korupsi mendadak tampak seperti kucing oren tak punya gigi. Sudah menge-

ong dua kali, pintu belum terbuka. Bedanya, kucing oren bisa mene-robos dapur, sedangkan penegakan hukum harus mengikuti prosedur.

Kalau begini, Kementerian ATR/BPN perlu membuka fakul-tas baru, Fakultas Ilmu Gaib dan Pertanahan. Jurusannya ada tiga: Administrasi Surat Panggilan, Manajemen Agenda Internal, dan Teknik Menghilang Tanpa Meninggalkan Jejak. Lulusannya mendapat gelar S.Kebal alias Sar-jana Kebal Panggilan.

Tentu, itu cuma lelucon. Yang tidak lucu adalah ketika publik terus menunggu kepastian. KPK memiliki power untuk menangkap Nusron.

Sepertinya masih sabar sih. Mungkin saja ketua KPK ada tele-pon dari atasan, atasannya lagi. Entahlah. Sejauh ini gigi KPK rontok akibat kesaktian politisi Golkar itu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

LINGKUNGAN

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Oleh Redaksi · 17 Okt, 08.50 WIB



BANDA ACEH -Presiden Pra-bowo Subianto sudah sepatutnya memberhentikan Menteri Kehuta-nan (Menhut) Raja Juli Antoni karena terbukti gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang merugikan masyarakat.

Demikian penegasan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) Pitra Romadoni Nasution, dikutip Jumat 16 Oktober 2026.

Menurut Pitra, persoalan kar-hutla tidak boleh dianggap sebagai bencana musiman yang terus beru-lang tanpa penyelesaian yang nyata.

Pasalnya, karhutla yang menim-bulkan asap tebal berwarna keku-ningan, mengganggu aktivitas masyarakat, dan berpotensi mem-bahayakan kesehatan merupakan persoalan serius yang membutuh-kan tindakan cepat, terukur, dan bertanggung jawab dari pemerin-tah.

“Pemerintah tidak boleh mem-biarkan masyarakat terus menjadi korban akibat kebakaran hutan dan lahan,” kata Pitra,

Menurut Petisi Ahli, penanga-nan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api telah meluas. Pemerintah harus memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan hutan,

deteksi dini titik api, kesiapan per-sonel dan peralatan, serta penega-kan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pemb-a-karan hutan dan lahan secara melawan hukum.

Pitra menilai evaluasi terhadap Menteri Kehutanan perlu dilaku-kan secara terbuka dengan mem-pertimbangkan capaian penceg-a-han karhutla, kecepatan respons terhadap kebakaran, efektivitas koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta langkah pemulihan kawasan yang terdamp-pak.

“Jika evaluasi yang objektif ter-bukti Menteri Kehutanan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dan kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki secara memadai, maka pemberhentian merupakan opsi yang patut diper-timbangkan,” kata Pitra.

Petisi Ahli mengingatkan bahwa paparan asap kebakaran hutan dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penya-kit pernapasan.

“Hak masyarakat atas lingku-ngan hidup yang baik dan sehat harus menjadi prioritas. Kesela-matan rakyat tidak boleh dikalah-kan oleh kepentingan apa pun,” pungkas Pitra.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

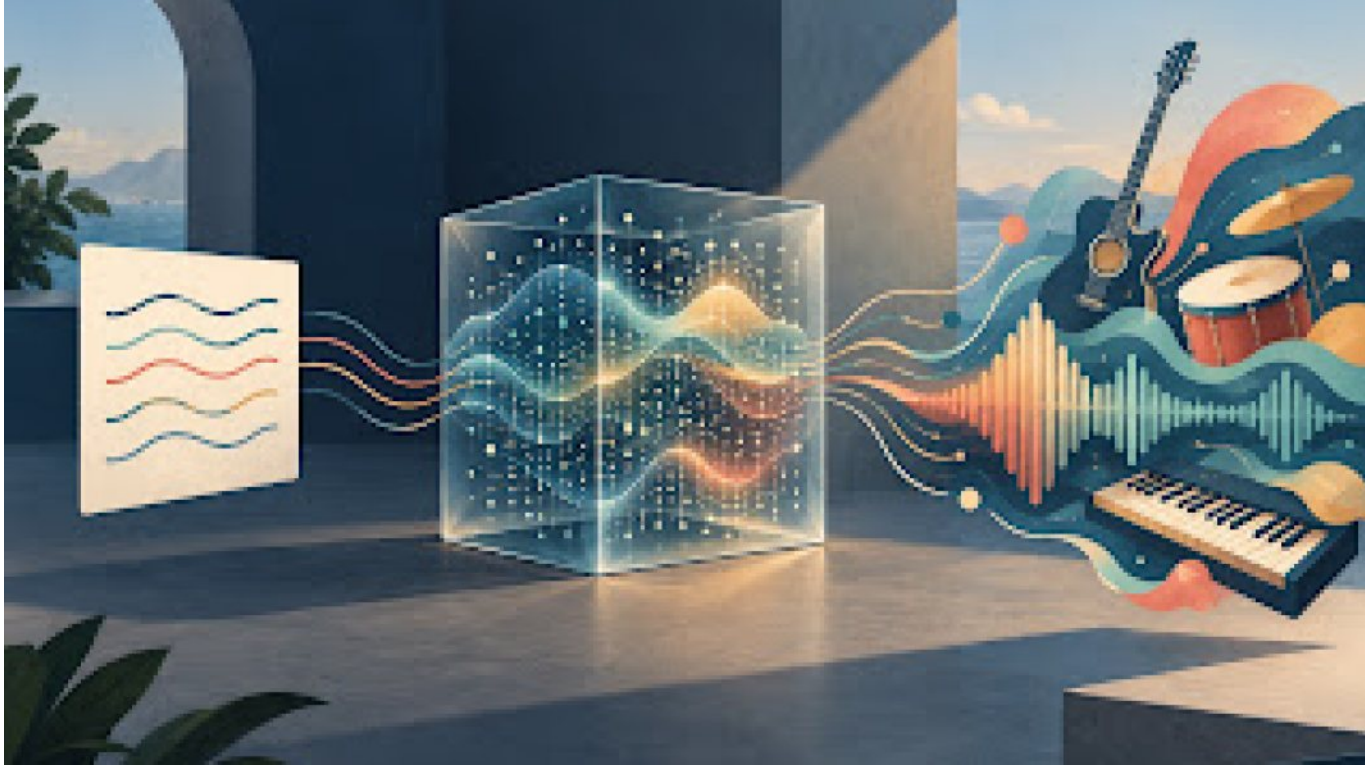
Pindai kode QR untuk berita terbaru



TEKNOLOGI

How AI Music Generators Actually Work: A Plain-English Guide for 2026

Oleh Redaksi · 17 Okt, 08.52 WIB



A few years ago, "AI music" mostly meant short, robotic loops that nobody wanted to listen to twice. Today you can type a sentence like "upbeat indie pop about a summer road trip, female vocals" and get a full song with verses, a chorus and a singer in a couple of minutes. For many people, that feels a little like magic.

It isn't magic, though, and understanding what is happening behind the button makes you much better at using these tools. This guide explains, without the jargon, how AI music generators work, what you can control, where they still fall short, and how to get better results from them.

What an AI music generator is

An AI music generator is software that creates new audio from an instruction. The instruction is usually a text prompt, but it can also be your own lyrics, a reference track, an image or a short video clip, depending on the tool. The output is an original piece of music, sometimes instrumental, sometimes with sung vocals.

Popular examples range from simple web apps to full creative suites. On Creatune.ai, for example, the AI music generator accepts either a short description or complete lyrics and returns finished tracks, while all-in-one platforms like AIMusicCreator.io combine song generation with everyday audio utilities such as cutting, changing volume or finding a track's key and tempo.

How the technology works, in simple terms

Step 1: Learning from huge amounts of music

Like other generative AI, music models are trained on very large collections of audio, often paired with descriptions such as genre, mood, instruments and tempo. During training, the model is not memorizing songs to play back. It is learning patterns: how a drum groove usually supports a bass line, how a chorus tends to lift in energy, how a voice moves from one note to the next.

Step 2: Turning sound into something a model can handle

Raw audio is enormous. One minute of high-quality sound contains millions of tiny measurements. To make it manageable,

most systems first compress audio into a much smaller set of "tokens" or a compact internal representation, a bit like turning a long video into a series of key frames. The model works in this compressed space and a separate component turns the result back into listenable sound at the end.

Step 3: Reading your prompt

When you type "melancholic lo-fi hip hop with soft piano," a language component converts your words into a numerical description the music model understands. Words like "melancholic," "lo-fi" and "piano" each push the result in a certain direction.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

OPINI

Andi Arief, Putusan MK, dan Hak Publik atas Klarifikasi Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 17 Okt, 08.59 WIB



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

Oleh: Agung Nugroho((Direktur Jakarta Institute))

ERNYATAAN Andi Arief mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dicermati.

Andi Arief berpandangan bahwa Gibran justru menjadi pihak yang dirugikan oleh putusan tersebut dan perlu memperoleh ruang untuk memberikan klarifikasi.

Bahkan, menurutnya, pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR dapat menjadi salah satu jalan untuk menjernihkan persoalan.

Andi Arief mengingatkan pengalaman Pansus Bank Century pada 2010 sebagai contoh bahwa forum pengawasan Politik dapat membuka ruang bagi pihak-pihak yang dipersalahkan untuk menjelaskan posisi mereka.

Dalam pandangannya, klarifikasi bukan semata-mata untuk membela seseorang, melainkan juga untuk menguji berbagai tuduhan dan mencari kejelasan.

Gagasan tersebut membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan bahwa persoalan yang menyangkut pejabat publik diselesaikan secara transparan, objektif, dan berdasarkan fakta?

Dalam negara demokratis, transparansi bukan ancaman bagi pejabat publik. Sebaliknya, transparansi merupakan bagian penting dari akuntabilitas kekuasaan.

Jika terdapat pertanyaan mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan seorang pejabat, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat yang sama, pihak yang dipersalahkan juga berhak mendapatkan proses yang adil dan tidak dihakimi berdasarkan prasangka.

Karena itu, persoalan ijazah Gibran tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai pertarungan antara pendukung dan penentang politik.

Yang lebih penting adalah memastikan apa yang sesungguhnya menjadi pokok putusan MK, fakta apa yang telah diperiksa, dan apakah masih terdapat pertanyaan relevan yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Putusan MK harus dihormati sesuai dengan amar dan pertimbangan hukumnya. Namun, penghormatan terhadap putusan pengadilan tidak berarti menutup ruang klarifikasi atas fakta yang memang belum terang.

Sebaliknya, klarifikasi juga tidak boleh digunakan untuk menarik kesimpulan yang tidak didukung bukti.

Dalam konteks ini, gagasan Andi Arief mengenai perlunya ruang klarifikasi patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

Adapun pilihan mekanismenya, termasuk kemungkinan pembentukan pansus, perlu mempertimbangkan dasar hukum, kewenangan DPR, serta kebutuhan nyata untuk mengungkap fakta.

Pada akhirnya, kepentingan yang harus diutamakan bukanlah keuntungan politik pihak tertentu, melainkan kepastian hukum, kredibilitas lembaga negara, dan hak masyarakat atas informasi yang benar.

Gibran berhak atas proses yang adil. Masyarakat berhak atas penjelasan yang terang. Dan negara berkewajiban memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan berdasarkan fakta serta mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, substansi persoalan ini bukan tentang siapa yang harus dibela atau siapa yang harus disalahkan.

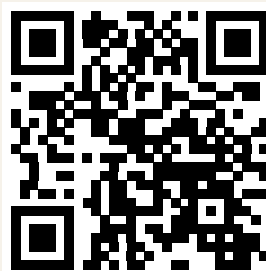
Persoalannya adalah bagaimana demokrasi memastikan bahwa kekuasaan tetap akuntabel, hukum tetap dihormati, dan kebenaran tidak dikalahkan oleh kepentingan politik.

Transparansi harus dijalankan. Klarifikasi harus diberi ruang. Kepastian hukum harus dijaga. Dan fakta harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan polemik ini.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

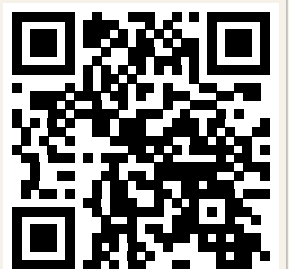
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia